

Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM di Desa Wisata Ketapanrame Trawas Mojokerto

[Community Empowerment Through MSMEs in Ketapanrame Tourism Village, Trawas, Mojokerto]

Segi Harimbua Nikta¹⁾, Hendra Sukmana^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *Community empowerment through Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) plays a vital role in enhancing the economic well-being of communities in tourism villages. However, various challenges persist, such as product quality, packaging hygiene, product standardization, the utilization of digital marketing, and the consistency of MSME participation. The Taman Ghanjaran and Sumber Gempong tourism villages in Ketapanrame Village, Trawas District, Mojokerto Regency, have implemented community empowerment through MSME development managed by the Village-Owned Enterprise (BUMDes). This study aims to analyze community empowerment through MSME utilization based on Mardi Yatmo Hutomo's theory, which encompasses capital, facilities and infrastructure, mentoring, institutional strengthening, and business partnerships. The study employs a descriptive qualitative method focused on examining community empowerment through MSME utilization. Research informants included the Deputy Village Head of Ketapanrame, the Head of BUMDes Mutiara Welirang, a local neighborhood association (RT) head, and MSME actors—specifically three food vendors and an administrator of the Ketapanrame Village MSME Group. Data were collected through interviews, observation, and documentation using purposive sampling, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman interactive model, comprising data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results indicate that regarding the capital indicator, MSME actors access capital through personal funds, BUMDes, cooperatives, and banking institutions to support business needs and development. Regarding the facilities and infrastructure indicator, BUMDes provides permanent stalls, electricity, clean water, storage facilities, and road access improvements that support business activities and visitor comfort. Regarding the mentoring indicator, MSME actors receive guidance through the formation of forums, business and financial management training, as well as branding and digital marketing workshops involving both BUMDes and external parties. Regarding the institutional strengthening indicator, empowerment is supported by MSME units operating under the Village-Owned Enterprise (BUMDes), Joint Business Groups (KUB), and Tourism Awareness Groups (POKDARWIS), all of which facilitate coordination and collaboration among stakeholders. In terms of the business partnership strengthening indicator, the BUMDes establishes collaborations with the government, financial institutions, the private sector, educational institutions, and local business operators within the tourism area to support MSME capital, training, promotion, and marketing. This study offers a novel contribution by comprehensively integrating Mardi Yatmo Hutomo's five empowerment indicators into the development of an MSME-based tourism village that is structured, participatory, and sustainable.*

Keywords - community empowerment; MSMEs; tourism village; BUMDes; qualitative research

Abstrak. *Pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa wisata. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kualitas produk, kebersihan kemasan, standardisasi produk, pemanfaatan pemasaran digital, dan konsistensi partisipasi UMKM. Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, telah menerapkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM yang dikelola oleh BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan UMKM berdasarkan teori Mardi Yatmo Hutomo yang meliputi permodalan, sarana dan prasarana, pendampingan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus untuk melihat pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan UMKM. Informan penelitian terdiri atas Wakil Kepala Desa Ketapanrame sebagai perangkat desa, Ketua BUMDes Mutiara Welirang, RT setempat, serta pelaku UMKM yang terdiri atas tiga orang penjual makanan, serta satu orang pengurus Kelompok UMKM Desa Ketapanrame. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, termasuk pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator permodalan, pelaku UMKM memperoleh akses modal melalui modal pribadi, BUMDes, koperasi, dan perbankan yang digunakan untuk mendukung kebutuhan dan pengembangan usaha. Pada indikator sarana dan prasarana, BUMDes menyediakan*

lapak permanen, listrik, air bersih, gudang penyimpanan, serta perbaikan akses jalan yang mendukung aktivitas usaha dan kenyamanan pengunjung. Pada indikator pendampingan, pelaku UMKM memperoleh pembinaan melalui pembentukan forum, pelatihan manajemen usaha dan keuangan, serta workshop branding dan digital marketing dengan melibatkan BUMDes dan pihak eksternal. Pada indikator penguatan kelembagaan, pemberdayaan didukung oleh unit UMKM di bawah BUMDes, Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang berperan dalam koordinasi dan kerja sama antar pelaku. Pada indikator penguatan kemitraan usaha, BUMDes membangun kerja sama dengan pemerintah, lembaga keuangan, pihak swasta, lembaga pendidikan, serta pelaku usaha di sekitar kawasan wisata untuk mendukung permodalan, pelatihan, promosi, dan pemasaran UMKM. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengintegrasikan kelima indikator pemberdayaan Mardi Yatmo Hutomo secara komprehensif dalam pengembangan desa wisata berbasis UMKM yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci - Pemberdayaan masyarakat; UMKM; desa wisata; BUMDes; penelitian kualitatif

I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan [1]. Salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat adalah melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui pengembangan UMKM, masyarakat dapat memanfaatkan potensi dan keterampilan yang dimiliki untuk membangun usaha yang produktif sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM bukan hanya sebagai motor penggerak perekonomian daerah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian [1]. Sejak tahun 1990-an, konsep pemberdayaan mulai dikenal luas dan semakin ditekankan pasca Konferensi Beijing 1995, ketika pemerintah Indonesia mengadopsi strategi pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk pengembangan UMKM. Keberadaan UMKM terbukti mampu bertahan pada berbagai kondisi krisis, mulai dari krisis moneter 1997–1998 hingga pandemi Covid-19 melalui berbagai bentuk adaptasi, seperti digitalisasi pemasaran, diversifikasi produk, dan kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketangguhan tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki fleksibilitas tinggi serta menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional maupun daerah [2].

Dalam implementasinya, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM tidak dapat dipisahkan dari pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, tradisi, serta aktivitas ekonomi masyarakat sebagai daya tarik wisata [3]. Keberadaan desa wisata memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan pariwisata. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan ekonomi yang mendukung kebutuhan wisatawan, seperti penyediaan makanan dan minuman, penginapan, jasa pemandu, transportasi, kerajinan, serta produk khas daerah. Keberhasilan desa wisata sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner, kerajinan, jasa, maupun produk kreatif lainnya [4]. UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat karena mampu memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Selain menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, aktivitas UMKM dalam desa wisata juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha [5].

Selain itu, penguatan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini mengatur kriteria UMKM sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan, pemberdayaan, pengembangan usaha, penyediaan akses pembiayaan, serta pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu berkembang dalam lingkungan usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan [6]. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai bagian penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Dukungan terhadap UMKM diperlukan karena pelaku usaha sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, kemampuan manajerial, akses pasar, teknologi, dan pengembangan produk. Dalam konteks desa wisata, dukungan tersebut menjadi semakin penting karena produk UMKM dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang ditawarkan kepada pengunjung. Penguatan kapasitas pelaku UMKM dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan kualitas produk, penguatan pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital. Akses pembiayaan juga diperlukan agar pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk mengembangkan skala usaha dan meningkatkan kapasitas produksinya [6].

Pengelolaan desa wisata juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola aset, mengembangkan potensi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha, termasuk pengembangan desa wisata dan pemberdayaan UMKM [6]. Keberadaan BUMDes dapat menjadi sarana bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki desa secara lebih terarah. Pengelolaan potensi tersebut dapat mencakup sektor pariwisata, perdagangan, jasa, pertanian, kerajinan, maupun kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pengembangan desa wisata, BUMDes dapat berperan dalam mengelola destinasi, menyediakan fasilitas pendukung, mengembangkan paket wisata, serta membantu pemasaran berbagai produk lokal. BUMDes juga dapat menjadi penghubung antara pelaku UMKM dengan pemerintah desa, wisatawan, serta pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan ekonomi lokal. Kolaborasi tersebut memungkinkan produk UMKM untuk lebih mudah dipasarkan sebagai bagian dari daya tarik desa wisata. Selain itu, pengelolaan usaha secara kelembagaan melalui BUMDes dapat meningkatkan koordinasi dan pembagian manfaat ekonomi di antara masyarakat desa [6].

Sebagai implementasi dari berbagai regulasi tersebut, pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ketapanrame didukung oleh beberapa Peraturan Desa (Perdes) yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan kelembagaan ekonomi desa. Peraturan Desa Ketapanrame Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa menjadi salah satu dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dimiliki desa untuk mendukung kepentingan masyarakat. Selain itu, Peraturan Desa Ketapanrame Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mutiara Welirang Desa Ketapanrame menjadi dasar kelembagaan BUMDes dalam mengelola berbagai potensi ekonomi desa. Pengelolaan tersebut diperkuat melalui Peraturan Desa Ketapanrame Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aset Desa berupa Barang Milik Desa kepada BUMDes Mutiara Welirang Desa Ketapanrame. Keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan dalam pemanfaatan aset desa dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengelolaan kawasan wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong serta keterlibatan pelaku UMKM dalam mendukung kegiatan pariwisata desa.

Dalam konteks tersebut, BUMDes memiliki peran strategis sebagai pengelola kawasan wisata sekaligus fasilitator pemberdayaan masyarakat. Di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, BUMDes mengembangkan dua destinasi utama, yaitu Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong, yang memadukan potensi wisata alam dengan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan UMKM [5]. Pengelolaan kedua destinasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pengembangan ekonomi masyarakat. BUMDes tidak hanya berperan dalam mengelola kegiatan wisata, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi yang mendukung keberlangsungan destinasi. Keterlibatan pelaku UMKM dalam kawasan wisata memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memasarkan produk dan jasa secara langsung kepada wisatawan. Kondisi tersebut dapat memperkuat hubungan antara sektor pariwisata dengan sektor ekonomi lokal sehingga manfaat keberadaan destinasi wisata dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat [5].

Proses pembentukan Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong diawali dengan identifikasi potensi wisata alam dan potensi ekonomi masyarakat Desa Ketapanrame. Selanjutnya pemerintah desa membentuk sistem pengelolaan melalui BUMDes, melakukan pembangunan infrastruktur wisata, penataan kawasan, penyediaan kios dan area usaha bagi masyarakat, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan destinasi wisata. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan wisata yang mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Penyediaan kios dan area usaha juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk menjalankan kegiatan usaha di sekitar kawasan wisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus mendorong masyarakat untuk berperan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan wisata. Pengembangan tersebut dilakukan secara bertahap sehingga kawasan wisata tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat berbasis UMKM [7].

UMKM yang aktif beroperasi di kawasan Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong memiliki karakteristik usaha yang beragam, meliputi usaha kuliner tradisional, makanan dan minuman siap saji, oleh-oleh khas daerah, jajanan lokal, kerajinan tangan, penyewaan wahana permainan, jasa fotografi, penjualan produk pertanian lokal, hingga berbagai usaha pendukung kegiatan wisata lainnya [8]. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa aktivitas UMKM di kawasan wisata tidak hanya berorientasi pada penjualan produk, tetapi juga mencakup penyediaan berbagai jasa yang menunjang kebutuhan wisatawan. Produk kuliner dan jajanan lokal dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata sekaligus memperkenalkan karakteristik pangan khas masyarakat setempat. Sementara itu, kerajinan dan produk pertanian lokal dapat menjadi alternatif oleh-oleh yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Keberadaan berbagai jenis usaha tersebut juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan keterampilan dan sumber daya lokal sebagai sumber pendapatan. Aktivitas UMKM yang berkembang di kawasan

wisata dapat menciptakan peluang kerja serta memperluas sumber penghasilan masyarakat melalui keterlibatan dalam rantai ekonomi pariwisata. Keberagaman jenis usaha tersebut menjadi salah satu daya tarik desa wisata sekaligus membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat [9]. Beragamnya jenis UMKM yang berkembang di kawasan Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempeng dapat dilihat pada dokumentasi berikut:



Gambar 1. UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempeng
Sumber: BUMDes Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempeng (2025)

Gambar 1 menunjukkan aktivitas berbagai pelaku UMKM dalam menyediakan produk dan jasa yang mendukung kegiatan wisata. Keberadaan usaha tersebut memperlihatkan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi kawasan wisata sebagai peluang ekonomi. Berbagai jenis usaha yang dijalankan masyarakat menunjukkan adanya keberagaman kegiatan ekonomi di kawasan wisata. Aktivitas tersebut mencakup penyediaan makanan, minuman, produk oleh-oleh, kerajinan, serta jasa yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan. Keberadaan UMKM tersebut turut mendukung aktivitas wisata sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pariwisata di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempeng turut mendorong perkembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan UMKM. Untuk memperkuat gambaran mengenai perkembangan pemberdayaan UMKM di kawasan Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempeng, berikut disajikan data jumlah UMKM selama periode 2022–2025:

Tabel 1. Data Jumlah UMKM Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempeng Tahun 2022-2025

Tahun	Taman Ghanjaran	Sumber Gempeng	Total UMKM
2022	60	15	75
2023	80	18	98
2024	90	19	109
2025	96	20	116

Sumber: BUMDes Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempeng (2025)

Berdasarkan Tabel 1, jumlah UMKM di kawasan Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempeng mengalami peningkatan secara konsisten dari 75 unit pada tahun 2022 menjadi 116 unit pada tahun 2025. Pada tahun 2023, jumlah UMKM meningkat dari 75 unit menjadi 98 unit atau bertambah sebesar 30,67% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024, jumlah UMKM kembali meningkat dari 98 unit menjadi 109 unit atau sebesar 11,22% dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah UMKM meningkat dari 109 unit menjadi 116 unit atau sebesar 6,42% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut merupakan hasil berbagai upaya konkret yang dilakukan oleh BUMDes bersama Pemerintah Desa Ketapanrame, antara lain penyediaan kios usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, digitalisasi pemasaran, promosi melalui media sosial dan event wisata, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kawasan wisata. Keberhasilan program ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah UMKM aktif setiap tahun, bertambahnya variasi produk yang dipasarkan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi wisata, serta berkembangnya kawasan wisata sebagai pusat ekonomi lokal. Berbeda dengan beberapa desa wisata yang lebih berorientasi pada pengembangan destinasi wisata, Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempeng mengintegrasikan pengelolaan destinasi dengan pemberdayaan UMKM melalui peran aktif BUMDes sebagai pengelola kawasan sekaligus pendamping pelaku usaha. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah UMKM selama periode 2022–2025 [19].

Penelitian yang dilakukan oleh Ridhani dan Sukmana (2023) mengenai *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Rumput Laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo* menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola program. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala pada akses informasi dan inovasi produk. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kolaborasi antaraktor dan optimalisasi potensi lokal [20].

Penelitian Yuni, Ardani, Bili, dan Kurnia (2023) mengenai *Pemberdayaan UMKM Berbasis Potensi Alam dalam Menunjang Pengembangan Desa Wisata Taro Menuju Pariwisata Berkelanjutan* menunjukkan bahwa pengembangan UMKM berbasis potensi lokal mampu meningkatkan nilai tambah produk masyarakat. Pengembangan tersebut juga dapat memperluas peluang usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan desa. Peningkatan kapasitas UMKM menjadi bagian penting dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Pengembangan desa wisata melalui UMKM juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku usaha agar potensi lokal dapat dikelola secara optimal. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM berbasis potensi alam dapat mendukung keberlanjutan desa wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat [1].

Penelitian Fatine (2022) mengenai *Pemberdayaan Masyarakat Kota di Bidang Ekonomi Melalui UMKM Ladu Arai Pinang di Lubuk Buaya Kota Padang* menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pengembangan UMKM dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan potensi usaha lokal yang dimiliki. Optimalisasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha secara lebih mandiri. Pemberdayaan melalui UMKM juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan dan mengembangkan kapasitas ekonominya. Oleh karena itu, pengembangan UMKM dapat berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat [17].

Penelitian lain oleh Ramadhani (2020) mengenai *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)* pada kelompok pembuat Kricu BaBe di Desa Batu Belubang menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis komunitas dapat mendorong pengembangan UMKM melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha. Keterlibatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengembangan dan pengelolaan usaha. Penguatan kapasitas masyarakat menjadi salah satu aspek penting agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kemampuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pendekatan berbasis komunitas juga dapat memperkuat kerja sama antaranggota masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal [4].

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong Ketapanrame Trawas. Permasalahan tersebut meliputi belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi, masih rendahnya kualitas produk yang ditunjukkan oleh kemasan yang kurang higienis, belum adanya standarisasi rasa pada beberapa produk kuliner, serta belum konsistennya partisipasi sebagian pelaku UMKM dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh BUMDes. Selain itu, masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung penjualan sehingga diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih optimal untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah membahas pemberdayaan masyarakat melalui UMKM maupun pengembangan desa wisata, penelitian tersebut umumnya berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat atau efektivitas program pemberdayaan. Penelitian terdahulu juga belum banyak mengkaji secara komprehensif pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan UMKM dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menggunakan teori pemberdayaan Mardi Yatmo Hutomo untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat melalui UMKM pada desa wisata. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong Ketapanrame, Trawas, Mojokerto dengan menggunakan teori pemberdayaan Mardi Yatmo Hutomo. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan (*research gap*) dengan memberikan gambaran mengenai pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dalam mendukung pengembangan desa wisata.

Penelitian menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardi Yatmo Hutomo yang memandang pemberdayaan sebagai proses meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan akses masyarakat terhadap sumber daya melalui lima indikator utama, yaitu permodalan, pembangunan sarana dan prasarana, pendampingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan usaha [18]. Sebagai teori pendukung digunakan tipologi kewirausahaan Clarence Danhof yang menjelaskan karakteristik wirausaha berdasarkan kemampuan berinovasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan memanfaatkan peluang usaha. Kombinasi kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis peran pemerintah desa dan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat melalui UMKM sekaligus

menjelaskan karakteristik pelaku UMKM dalam memanfaatkan program pemberdayaan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong Ketapanrame Trawas Mojokerto. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan teori Mardi Yatmo Hutomo untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan UMKM pada dua kawasan desa wisata yang dikelola secara terpadu oleh BUMDes, yaitu Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong Ketapanrame Trawas Mojokerto menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo yang meliputi lima aspek, yaitu permodalan, pembangunan sarana dan prasarana, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta penguatan kemitraan usaha [10]. Fokus penelitian ini untuk melihat pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong Ketapanrame Trawas Mojokerto [11]. Lokasi penelitian berada di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder [12]. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata dan kegiatan UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, UMKM, dan desa wisata [13]. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi [14]. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM [15]. Informan penelitian terdiri atas Wakil Kepala Desa Ketapanrame sebagai Perangkat Desa, Ketua BUMDes Mutiara Welirang, RT setempat, serta pelaku UMKM yang terdiri atas tiga orang penjual makanan, yaitu bakso, mie ayam, dan soto, serta satu orang pengurus Kelompok UMKM Desa Ketapanrame [16]. Teknik analisis data yang digunakan adalah Model Interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi [17].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis data, pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong Ketapanrame Trawas Mojokerto telah membawa perubahan signifikan dalam peningkatan kapasitas ekonomi lokal [19]. Program pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada penguatan potensi usaha mikro dan kecil, tetapi juga pada penciptaan ekosistem wisata yang inklusif melalui sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat pelaku UMKM [18]. Implementasi program mencakup aspek permodalan, pembangunan sarana prasarana, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, hingga kemitraan strategis [17]. Melalui pendekatan ini, pemberdayaan tidak hanya menjadi konsep teoritis, melainkan telah terwujud dalam praktik nyata yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan daya tarik desa wisata [20]. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis teori pemberdayaan masyarakat dari Mardi Yatmo Hutomo, yang menekankan lima indikator [14]. Lima indikator tersebut yaitu permodalan, pembangunan sarana prasarana, pendampingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan usaha [15]. Melalui kelima indikator tersebut, penelitian ini menilai sejauh mana strategi pemberdayaan UMKM di Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong mampu memberikan nilai nyata berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat [16].

A. Permodalan

Indikator permodalan menurut teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo merupakan aspek mendasar yang mencakup segala bentuk dukungan modal, baik finansial maupun keterampilan dasar, yang dibutuhkan untuk mendorong keberhasilan usaha masyarakat. Permodalan tidak semata-mata dipahami sebagai dana yang diberikan oleh lembaga desa, tetapi meliputi berbagai sumber, seperti dana pribadi pelaku usaha, akses pinjaman melalui bank, koperasi simpan pinjam, dana desa, hingga dukungan program pemerintah maupun CSR swasta. Tanpa adanya modal yang memadai, pelaku UMKM akan sulit meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, atau mengembangkan inovasi produk baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Mutiara Welirang, dijelaskan bahwa:

“Kami membantu pelaku UMKM lokal dengan memfasilitasi akses permodalan melalui BUMDes yang bersumber dari program pembiayaan desa dan bekerja sama dengan koperasi simpan pinjam. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp2 juta hingga Rp10 juta, tergantung skala usaha. Selain modal dana, kami juga memberikan pelatihan keterampilan dasar, seperti manajemen keuangan dan pengemasan produk, agar bantuan modal yang diberikan bisa dimanfaatkan secara maksimal.” (Wawancara 3 Februari 2025).

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut, dari 20 pelaku UMKM yang menjadi informan penelitian, sebanyak 9 pelaku UMKM menggunakan modal pribadi sebagai sumber modal utama, 4 pelaku UMKM memperoleh tambahan modal melalui BUMDes, 4 pelaku UMKM menggunakan pinjaman dari koperasi simpan pinjam, dan 3 pelaku UMKM memanfaatkan pinjaman dari bank. Pelaku UMKM yang memperoleh bantuan permodalan melalui BUMDes mendapatkan modal dalam kisaran Rp2.000.000 sampai Rp10.000.000 sesuai dengan skala dan kebutuhan usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa sumber permodalan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjangan dan Sumber Gempong cukup beragam dan tidak hanya bergantung pada modal pribadi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran sebagai fasilitator dalam membuka akses permodalan bagi masyarakat. Besaran modal yang disesuaikan dengan skala usaha menunjukkan adanya upaya agar bantuan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pelaku UMKM. Selain bantuan finansial, pemberian pelatihan manajemen keuangan dan pengemasan produk menunjukkan bahwa permodalan dalam proses pemberdayaan tidak hanya berupa pemberian uang, tetapi juga disertai peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan modal. Hal tersebut sesuai dengan indikator permodalan dalam teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo yang menempatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan peningkatan kemampuan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pemberdayaan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Siti Rahma selaku pelaku UMKM yang memperoleh dukungan permodalan dari BUMDes. Beliau menyampaikan:

“Modal dari BUMDes sangat membantu untuk membeli peralatan produksi yang lebih modern. Sebelumnya, kapasitas produksi kami hanya 10 kg per hari, sekarang bisa 25 kg. Dampaknya, pendapatan meningkat hampir dua kali lipat, dan kami bisa mempekerjakan dua orang tambahan dari warga sekitar.” (Wawancara 4 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tambahan modal yang diterima digunakan untuk membeli peralatan produksi sehingga kapasitas produksi meningkat dari 10 kg menjadi 25 kg per hari atau mengalami peningkatan sebesar 15 kg per hari. Peningkatan kapasitas produksi tersebut kemudian berdampak terhadap pendapatan usaha yang meningkat hampir dua kali lipat serta membuka dua lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Data tersebut menunjukkan bahwa modal yang diberikan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lain melalui penyerapan tenaga kerja.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa permodalan telah berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan karena mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan kegiatan ekonominya. Penggunaan modal untuk membeli peralatan produksi menunjukkan bahwa bantuan modal diarahkan pada kegiatan produktif yang dapat meningkatkan jumlah produksi dan pendapatan. Kondisi tersebut sejalan dengan teori Mardi Yatmo Hutomo bahwa pemberdayaan melalui aspek permodalan diarahkan untuk memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan demikian, keberadaan modal tidak hanya memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha penerima bantuan, tetapi juga menghasilkan dampak lanjutan berupa peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Dukungan pemerintah desa terhadap permodalan UMKM juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan Wakil Kepala Desa Ketapanrame yang menyampaikan:

“Dari pemerintah desa memang ada dukungan untuk membantu UMKM, terutama melalui BUMDes. Kami berusaha agar pelaku UMKM yang membutuhkan modal bisa mendapatkan akses pembiayaan dan tidak hanya mengandalkan modal pribadi. Selain itu, pemerintah desa juga mendorong BUMDes untuk membantu menghubungkan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan atau program bantuan yang tersedia.” (Wawancara 4 Februari 2025).

Berdasarkan keterangan tersebut, pemerintah desa tidak secara langsung menjadi satu-satunya sumber modal bagi UMKM, tetapi berperan dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai sumber pembiayaan. Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui BUMDes dengan menghubungkan pelaku UMKM kepada sumber modal dari dana desa, koperasi simpan pinjam, bank, maupun program bantuan lainnya. Data wawancara terhadap 20 informan menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih menggunakan modal pribadi sebagai sumber utama, sedangkan sebagian lainnya telah memanfaatkan akses pembiayaan melalui BUMDes, koperasi simpan pinjam, dan bank. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses permodalan eksternal telah tersedia, tetapi modal pribadi masih menjadi salah satu sumber pembiayaan yang digunakan oleh pelaku UMKM.

Penyajian rincian tersebut bertujuan untuk memperlihatkan sumber modal yang digunakan oleh pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sumber modal yang digunakan berasal dari modal pribadi, BUMDes, koperasi simpan pinjam, dan perbankan. Setiap pelaku UMKM memiliki kebutuhan modal yang berbeda sesuai dengan jenis

dan skala usaha yang dijalankan. Perbedaan tersebut terlihat dari besaran modal yang digunakan maupun pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan usaha. Informasi mengenai sumber, nominal, dan pemanfaatan modal masing-masing informan menjadi bagian penting dalam menggambarkan akses permodalan yang tersedia bagi pelaku UMKM. Rincian sumber dan nominal permodalan masing-masing pelaku UMKM dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Sumber dan Besaran Modal Pelaku UMKM

No.	Informan	Sumber Modal	Nominal Modal	Keterangan
1	Informan 1	Modal pribadi	Rp3.000.000	Modal awal usaha
2	Informan 2	Modal pribadi	Rp5.000.000	Pembelian bahan baku dan peralatan
3	Informan 3	Modal pribadi	Rp4.000.000	Modal operasional
4	Informan 4	Modal pribadi	Rp7.000.000	Pengembangan usaha
5	Informan 5	Modal pribadi	Rp2.500.000	Modal awal usaha
6	Informan 6	Modal pribadi	Rp6.000.000	Pembelian peralatan
7	Informan 7	Modal pribadi	Rp3.500.000	Modal operasional
8	Informan 8	Modal pribadi	Rp5.000.000	Pembelian bahan baku
9	Informan 9	Modal pribadi	Rp4.500.000	Pengembangan usaha
10	Informan 10	BUMDes	Rp2.000.000	Pembelian bahan baku
11	Informan 11	BUMDes	Rp5.000.000	Pembelian peralatan produksi
12	Informan 12	BUMDes	Rp7.000.000	Penambahan modal usaha
13	Informan 13	BUMDes	Rp10.000.000	Pengembangan usaha
14	Informan 14	Koperasi	Rp4.000.000	Modal operasional
15	Informan 15	Koperasi	Rp6.000.000	Pembelian bahan baku
16	Informan 16	Koperasi	Rp5.000.000	Pembelian peralatan
17	Informan 17	Koperasi	Rp8.000.000	Pengembangan usaha
18	Informan 18	Bank	Rp7.000.000	Penambahan modal usaha
19	Informan 19	Bank	Rp10.000.000	Pembelian peralatan
20	Informan 20	Bank	Rp5.000.000	Modal operasional

Sumber: BUMDes Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong (2025)

Berdasarkan Tabel 2, dari 20 pelaku UMKM yang menjadi informan penelitian, sebanyak 9 pelaku UMKM menggunakan modal pribadi dengan nominal yang berkisar antara Rp2.500.000 sampai Rp7.000.000. Sebanyak 4 pelaku UMKM memperoleh tambahan modal melalui BUMDes dengan nominal antara Rp2.000.000 sampai Rp10.000.000 sesuai dengan skala dan kebutuhan usaha. Selanjutnya, 4 pelaku UMKM menggunakan pinjaman dari koperasi simpan pinjam dengan nominal antara Rp4.000.000 sampai Rp8.000.000, sedangkan 3 pelaku UMKM memanfaatkan pinjaman bank dengan nominal antara Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000. Modal yang diperoleh tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha, seperti pembelian bahan baku, peralatan produksi, modal operasional, dan pengembangan usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki sumber permodalan yang beragam dan tidak hanya bergantung pada modal pribadi. Keberadaan BUMDes menjadi salah satu alternatif akses permodalan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan usahanya.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa permodalan bagi UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong berasal dari beberapa sumber, yaitu modal pribadi, koperasi simpan pinjam, bank, serta program pembiayaan desa melalui BUMDes. Dukungan permodalan tersebut tidak hanya berbentuk modal finansial, tetapi juga disertai dengan penguatan keterampilan dasar, seperti manajemen keuangan dan teknik pengemasan produk, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan dalam memanfaatkan modal yang diperoleh. Modal yang diberikan melalui BUMDes dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan usaha, seperti pembelian peralatan produksi dan pengembangan kapasitas usaha. Pemanfaatan modal tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, yang terlihat dari peningkatan kapasitas produksi, peningkatan pendapatan, serta bertambahnya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo pada indikator permodalan, di mana akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi salah satu unsur penting dalam mendorong kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam pemerataan akses pembiayaan dan pendampingan pengelolaan modal bagi seluruh pelaku UMKM. Dengan demikian, dukungan permodalan yang diberikan melalui BUMDes, koperasi, dan lembaga perbankan telah memberikan manfaat bagi pengembangan usaha masyarakat, tetapi keberlanjutan akses modal dan kemampuan pengelolaannya tetap perlu ditingkatkan agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aini, Sari, dan Winahyu (2022) yang berjudul “Analisis Kesehatan BUMDes Berdasarkan Aspek Permodalan, Likuiditas, Kemandirian dan

Pertumbuhan (Studi Kasus BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)” yang menunjukkan bahwa aspek permodalan merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha melalui kelembagaan desa. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada analisis kesehatan BUMDes berdasarkan aspek permodalan, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan, sedangkan penelitian ini berfokus pada permodalan sebagai salah satu indikator pemberdayaan masyarakat melalui UMKM di kawasan desa wisata [21].

B. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Indikator pembangunan sarana dan prasarana menurut teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo merupakan faktor penting yang menunjang kelancaran aktivitas UMKM sekaligus meningkatkan daya tarik desa wisata. Sarpras yang layak tidak hanya membantu kelancaran operasional usaha, tetapi juga memberi kenyamanan bagi pengunjung dan memperluas peluang pasar. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong, pembangunan sarpras tidak hanya bertumpu pada desa atau BUMDes, tetapi juga didukung oleh sponsor dan pemerintah. Fasilitas pendukung seperti lapak permanen, akses jalan, serta utilitas usaha memang dibangun oleh desa, namun ada juga kontribusi sponsor berupa papan menu, meja, kursi, hingga dukungan dari bank seperti BRI yang membantu penyediaan fasilitas promosi dan kebutuhan operasional UMKM. Sinergi ini menunjukkan bahwa pembangunan sarpras merupakan hasil kolaborasi banyak pihak demi mendukung keberlanjutan usaha masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Mutiara Welirang, disampaikan bahwa:

“Kami membangun lapak permanen untuk UMKM di area pintu masuk Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong. Ada 15 unit lapak yang dilengkapi listrik, air bersih, dan papan nama usaha. Kami juga menyediakan gudang penyimpanan bahan baku bersama agar pelaku UMKM tidak kesulitan dalam stok barang. Selain itu, kami memperbaiki akses jalan menuju area wisata untuk mempermudah distribusi barang.” (Wawancara 3 Februari 2025).

Pernyataan tersebut memperlihatkan dukungan konkret dari desa dalam penyediaan lapak, utilitas dasar, dan akses jalan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat 15 unit lapak permanen yang telah disediakan dan dilengkapi dengan tiga fasilitas utama, yaitu listrik, air bersih, dan papan nama usaha. Selain itu, BUMDes juga menyediakan gudang penyimpanan bahan baku bersama serta melakukan perbaikan akses jalan menuju kawasan wisata. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana tidak hanya berupa penyediaan tempat berjualan, tetapi juga mencakup fasilitas penunjang operasional UMKM dan kelancaran distribusi barang. Namun, di lapangan, fasilitas tambahan seperti papan menu, meja, kursi, hingga perlengkapan promosi banyak disediakan oleh sponsor dan pihak swasta, termasuk dukungan dari Bank BRI yang ikut berkontribusi di kawasan Sumber Gempong. Dengan adanya kolaborasi ini, pelaku UMKM dapat beroperasi lebih nyaman, produk mereka tampil lebih menarik, serta pengunjung merasa lebih betah. Ibu Rini Astuti, salah satu pelaku UMKM, juga menegaskan dampak nyata dari pembangunan sarpras:

“Sebelum ada lapak permanen, kami berjualan di tenda darurat yang sering bocor saat hujan. Sekarang, dengan fasilitas baru, produk lebih terlindungi dan pembeli juga lebih nyaman. Penjualan naik 30% sejak kami menempati lapak ini. Akses jalan yang lebih baik juga membuat pasokan bahan baku lebih lancar.” (Wawancara 4 Februari 2025).

Pengalaman tersebut membuktikan bahwa sarpras yang layak mampu meningkatkan produktivitas dan penjualan pelaku UMKM. Data hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah menempati lapak permanen, penjualan Ibu Rini Astuti mengalami peningkatan sebesar 30%. Angka tersebut menjadi gambaran konkret bahwa penyediaan sarana usaha memberikan dampak terhadap perkembangan aktivitas ekonomi pelaku UMKM. Jika sebelumnya penjual harus menghadapi keterbatasan fasilitas, kini dengan adanya dukungan lapak, akses jalan, dan perlengkapan tambahan dari sponsor, usaha mereka menjadi lebih stabil dan profesional. Dengan demikian, pengembangan UMKM menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi di tingkat lokal. Selain pelaku UMKM, kondisi pembangunan sarana dan prasarana juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan RT setempat yang menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk fasilitas, sekarang memang sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Jalan menuju lokasi wisata sudah lebih mudah dilewati, tempat berjualan juga lebih tertata, dan fasilitas untuk pengunjung semakin lengkap. Masyarakat di sekitar juga ikut merasakan manfaatnya karena semakin banyak orang yang datang dan usaha warga menjadi lebih ramai. Kalau ada fasilitas yang kurang atau mengalami kerusakan, biasanya kami sampaikan kepada pihak desa atau pengelola untuk ditindaklanjuti.” (Wawancara 4 Februari 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM, tetapi juga memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kunjungan wisata. Keterlibatan RT dalam menyampaikan kondisi fasilitas kepada pemerintah desa atau pengelola turut mendukung proses pemeliharaan dan perbaikan sarana yang tersedia. Dengan adanya 15 unit lapak permanen, fasilitas listrik dan air bersih, gudang penyimpanan bahan baku, serta perbaikan akses jalan, pembangunan sarana dan prasarana telah memberikan dukungan nyata terhadap aktivitas usaha masyarakat.

Sementara itu, peningkatan penjualan sebesar 30% yang dirasakan oleh salah satu pelaku UMKM memperlihatkan bahwa sarana usaha yang lebih layak dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi fasilitas yang mendukung aktivitas UMKM di kawasan wisata, berikut disajikan dokumentasi sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong:



Gambar 2. Sarana dan Prasarana di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong
Sumber: BUMDes Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong (2025)

Gambar 2 menunjukkan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap aktivitas UMKM yang berada di kawasan wisata. Keberadaan lapak dan fasilitas pendukung memberikan tempat usaha yang lebih layak dan tertata bagi pelaku UMKM. Sarana yang tersedia juga mendukung kenyamanan pengunjung selama melakukan aktivitas wisata. Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan lingkungan usaha yang dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, pelaku UMKM memiliki ruang yang lebih mendukung untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong dilakukan melalui dukungan desa dan BUMDes serta melibatkan kontribusi sponsor, pemerintah, dan pihak swasta, termasuk Bank BRI. Berdasarkan hasil wawancara, BUMDes telah menyediakan 15 unit lapak permanen yang dilengkapi listrik, air bersih, dan papan nama usaha, serta menyediakan gudang penyimpanan bahan baku dan memperbaiki akses jalan menuju kawasan wisata. Dukungan tersebut memberikan manfaat terhadap kegiatan UMKM, salah satunya terlihat dari peningkatan penjualan sebesar 30% yang dirasakan oleh pelaku UMKM setelah menempati lapak permanen. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo pada indikator pembangunan sarana dan prasarana, di mana tersedianya fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Meskipun demikian, pembangunan sarana dan prasarana masih perlu diikuti dengan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan, pemerataan fasilitas bagi pelaku UMKM, serta penguatan pemanfaatan fasilitas untuk mendukung pemasaran dan pengembangan usaha. Dengan demikian, pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan, kelancaran operasional, dan perkembangan usaha masyarakat, tetapi efektivitasnya akan lebih optimal apabila disertai dengan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muaffaq et al. (2026) yang berjudul “Revitalisasi Kawasan Wisata LGS Desa Kucur Melalui Optimalisasi Sarana-Prasarana dan Digitalisasi Pelayanan BUMDes Guna Akselerasi Peningkatan Kunjungan Wisatawan” yang menunjukkan bahwa optimalisasi sarana dan prasarana dapat mendukung pengembangan kawasan wisata dan meningkatkan aktivitas kunjungan wisatawan. Persamaannya terletak pada pentingnya penyediaan dan optimalisasi sarana-prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada revitalisasi kawasan wisata melalui optimalisasi sarana-prasarana yang dipadukan dengan digitalisasi pelayanan BUMDes, sedangkan penelitian ini memfokuskan pembangunan sarana dan prasarana sebagai salah satu indikator pemberdayaan masyarakat melalui UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong [22].

C. Pendampingan

Indikator pendampingan dalam teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo merupakan aspek penting yang berfungsi memfasilitasi proses pembelajaran, memberi ruang refleksi, serta memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui dukungan teknis, manajerial, hingga akses pemasaran. Pendampingan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, melainkan juga mencakup keterlibatan pihak eksternal untuk memastikan pelaku usaha mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dalam konteks pemberdayaan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong, pendampingan berjalan lebih komprehensif karena melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, swasta, maupun akademisi. Di Sumber Gempong, pendampingan UMKM

secara aktif dilakukan oleh BRI melalui dukungan program permodalan dan literasi keuangan, Astra yang berfokus pada pelatihan kewirausahaan serta strategi pemasaran, dan UBAYA (Universitas Surabaya) yang rutin mengadakan program pengabdian masyarakat berupa pelatihan manajemen usaha, desain produk, serta digital marketing. Kolaborasi multipihak ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya dijalankan oleh BUMDes, melainkan melibatkan jejaring lebih luas untuk memperkuat kapasitas UMKM lokal. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ketua BUMDes Mutiara Welirang dalam wawancara:

“Pendampingan kepada pelaku UMKM dilakukan melalui beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pada tahap awal, kami membentuk Forum UMKM Wisata sebagai wadah untuk berkoordinasi dan menyampaikan kebutuhan usaha. Selanjutnya, kami memberikan pelatihan manajemen usaha dan keuangan, kemudian dilanjutkan dengan workshop branding dan digital marketing. Dalam kegiatan tersebut, kami juga melibatkan pihak dari Dinas Koperasi, akademisi, serta pihak swasta seperti BRI, Astra, dan UBAYA sesuai dengan bidang pendampingannya. Kami berharap melalui kegiatan tersebut pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.” (Wawancara 3 Februari 2025).

Pernyataan tersebut sesuai dengan praktik di lapangan, di mana pendampingan tidak hanya berasal dari BUMDes, tetapi juga diperkuat oleh dukungan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 3 kegiatan pendampingan yang terdokumentasi pada tahun 2022–2023, yaitu pembentukan Forum UMKM Wisata pada tahun 2022, pelatihan manajemen usaha dan keuangan pada tahun 2023, serta workshop branding dan digital marketing pada tahun 2023. Ketiga kegiatan tersebut menunjukkan adanya tahapan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM, mulai dari penguatan koordinasi dan kerja sama, peningkatan kemampuan pengelolaan usaha dan keuangan, hingga pengembangan kemampuan branding dan pemasaran digital. BRI membantu meningkatkan literasi finansial UMKM dan memberikan akses permodalan yang lebih mudah, Astra menghadirkan pelatihan terkait strategi branding dan pemasaran produk agar sesuai dengan tren konsumen modern, sementara UBAYA berperan melalui workshop pengembangan produk, desain kemasan, serta pemasaran berbasis digital. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan melalui kolaborasi multipihak dengan bidang pendampingan yang saling melengkapi, sehingga pelaku UMKM memperoleh dukungan tidak hanya dalam aspek pengelolaan usaha, tetapi juga dalam pengembangan produk dan perluasan pemasaran. Ibu Siti, salah satu pelaku UMKM, juga menegaskan dampak nyata dari pendampingan:

“Dulu saya hanya bisa menjual kerajinan sederhana di pasar desa dengan penghasilan yang terbatas. Setelah ada pendampingan dari tim KKN, universitas, dan perusahaan swasta, saya mulai belajar membuat desain yang lebih menarik, memasarkan lewat media sosial, dan memahami cara mengatur keuangan usaha. Hasilnya, produk saya sekarang bisa masuk ke toko oleh-oleh di kawasan wisata, bahkan ada pesanan dari luar kota lewat penjualan online. Saya merasa usaha kecil saya kini lebih dihargai dan punya peluang untuk berkembang lebih besar.” (Wawancara 3 Februari 2025).

Pernyataan tersebut menggambarkan dampak nyata pendampingan multipihak terhadap transformasi UMKM di Desa Wisata. Sebelum ada intervensi, usaha kerajinan masih bersifat tradisional dan terbatas pada pasar lokal. Namun, melalui program pelatihan desain, digital marketing, serta literasi finansial yang diinisiasi oleh universitas, perusahaan swasta, dan lembaga keuangan, produk kerajinan tersebut kini mampu menembus pasar yang lebih luas. Data hasil wawancara menunjukkan adanya perubahan pada cakupan pemasaran usaha, dari yang sebelumnya hanya menjangkau pasar desa menjadi dapat dipasarkan melalui toko oleh-oleh di kawasan wisata dan penjualan online dengan pesanan dari luar kota. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan penerapan keterampilan dalam pengelolaan usaha, desain produk, pemasaran digital, dan perluasan akses pasar. Kasus ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat peningkatan daya saing UMKM dengan cara memberikan pengetahuan baru, membuka akses pasar, dan memperluas jaringan usaha. Selain itu, pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk menyesuaikan pengetahuan yang diperoleh dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam pendampingan dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam memperkuat kemandirian dan keberlanjutan usaha UMKM di kawasan desa wisata.

Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pendampingan yang dilakukan secara bertahap, berikut disajikan program dan kegiatan pendampingan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong selama tahun 2022–2023. Pendampingan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usaha sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi. Kegiatan pendampingan mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, manajemen usaha, pengelolaan keuangan, branding, serta pemasaran produk. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pelaku UMKM di kawasan desa wisata. Selain BUMDes, kegiatan pendampingan juga melibatkan beberapa pihak pendukung yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan sesuai dengan bidang masing-masing. Keterlibatan berbagai pihak tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh pengetahuan yang lebih beragam dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan pendampingan, pelaku UMKM tidak

hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga diarahkan untuk menerapkannya dalam pengelolaan usaha sehari-hari. Rincian program dan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama periode tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Program / Kegiatan Pendampingan Tahun 2022-2023

Tahun	Program / Kegiatan	Peserta	Materi yang Diperoleh
2022	Pembentukan Forum UMKM Wisata	75 Pelaku UMKM Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong	Koordinasi antar pelaku UMKM, komunikasi dengan BUMDes, pengelolaan forum, penyampaian kebutuhan usaha, dan kerja sama antar pelaku usaha
2023	Pelatihan Manajemen Usaha & Keuangan	55 Pelaku UMKM Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong	Pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan modal, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta perencanaan keuangan usaha
	Workshop Branding & Digital Marketing	61 Pelaku UMKM Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong	Pembuatan identitas produk, desain kemasan, strategi branding, pemanfaatan media sosial, pembuatan konten promosi, dan pemasaran secara digital

Sumber: Bumdes Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong, 2025

Berdasarkan Tabel 3, kegiatan pemberdayaan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong menunjukkan adanya tahapan penguatan kapasitas pelaku usaha yang terstruktur. Pada tahun 2022, pembentukan Forum UMKM Wisata diikuti oleh 75 orang sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar pelaku usaha dengan BUMDes serta pemerintah desa. Selanjutnya, pada tahun 2023 sebanyak 55 orang mengikuti Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan untuk meningkatkan kemampuan dalam pencatatan keuangan, pengelolaan modal, serta perencanaan usaha. Pada tahun yang sama, sebanyak 61 orang mengikuti Workshop Branding dan Digital Marketing yang memberikan pengetahuan mengenai identitas produk, desain kemasan, pemanfaatan media sosial, dan pemasaran digital. Kedua program tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan pengelolaan usaha, tetapi juga pada penguatan kemampuan pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Selain itu, pelaksanaan pendampingan juga melibatkan berbagai pihak di luar BUMDes, seperti BRI, Astra, UBAYA, Dinas Koperasi, akademisi, dan tim KKN. Keterlibatan berbagai pihak tersebut memberikan variasi materi pendampingan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, mulai dari literasi keuangan, kewirausahaan, branding, pengembangan produk, hingga digital marketing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan melalui pendekatan multipihak sehingga dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa pendampingan UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong tidak hanya dilakukan melalui BUMDes, tetapi juga diperkuat dengan keterlibatan pihak eksternal seperti BRI, Astra, dan UBAYA. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo pada indikator pendampingan yang menekankan pentingnya dukungan dan fasilitasi secara berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan melalui pembentukan forum, pelatihan manajemen usaha dan keuangan, serta workshop branding dan digital marketing menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Pendampingan tersebut juga memberikan dampak terhadap peningkatan keterampilan, inovasi produk, dan perluasan akses pemasaran, meskipun pelaksanaannya masih perlu diperkuat melalui integrasi dengan aspek kelembagaan dan kemitraan usaha agar proses pemberdayaan dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tini dan Yuliastina (2021) yang berjudul “Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Administrasi BUMDes di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng” yang menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengelolaan kelembagaan masyarakat. Persamaannya terletak pada pentingnya pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas serta kemampuan pengelolaan masyarakat. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pelatihan dan pendampingan administrasi BUMDes, sedangkan penelitian ini memfokuskan pendampingan sebagai salah satu indikator pemberdayaan pelaku UMKM melalui

peningkatan kemampuan manajemen usaha, keuangan, branding, dan pemasaran digital. Pendampingan dalam penelitian ini juga diarahkan untuk membantu pelaku UMKM menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pengembangan usaha secara berkelanjutan [23].

D. Penguatan Kelembagaan

Indikator penguatan kelembagaan dalam teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo menekankan pentingnya memperkuat organisasi, kelompok, atau komunitas agar proses pemberdayaan berjalan efektif dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan mencakup pembentukan struktur organisasi yang jelas, peningkatan kapasitas pengurus, pembagian tugas yang terstruktur, serta membangun sistem koordinasi dan komunikasi yang solid antar pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan UMKM desa wisata, kelembagaan yang kuat akan mempermudah pengelolaan program, pengambilan keputusan, serta kolaborasi lintas sektor. Kelembagaan yang terorganisasi dengan baik juga dapat memperkuat peran masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha dan mendukung keberlanjutan program pemberdayaan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Mutiara Welirang, dijelaskan bahwa:

“Sejak awal, kami membentuk unit khusus yang menangani pemberdayaan UMKM di bawah naungan BUMDes. Unit ini memiliki struktur organisasi yang jelas, mulai dari koordinator lapangan, bagian pelatihan, hingga bagian pemasaran. Kami juga membuat aturan internal dan SOP agar setiap program berjalan terarah. Selain itu, kami rutin mengadakan rapat koordinasi dengan perwakilan UMKM untuk membahas progres dan kendala di lapangan.” (Wawancara 3 Februari 2025).

BUMDes sejak awal telah membangun struktur kelembagaan dalam pemberdayaan UMKM dengan membentuk unit khusus yang memiliki pembagian fungsi yang jelas. Unit ini dibagi ke dalam beberapa fungsi, seperti koordinator lapangan yang memastikan program berjalan, bagian pelatihan yang fokus meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta bagian pemasaran yang membantu memperluas jaringan distribusi produk. Tidak hanya itu, BUMDes juga menyusun aturan internal dan SOP sebagai pedoman agar setiap kegiatan lebih terarah, transparan, dan terukur. Untuk menjaga kesinambungan, rapat koordinasi rutin digelar bersama perwakilan UMKM guna mengevaluasi perkembangan, mengidentifikasi kendala, serta menyusun solusi bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan secara sistematis dan partisipatif, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal bagi pelaku usaha maupun masyarakat desa.

Penguatan kelembagaan tersebut juga terlihat dari adanya wadah kelompok yang menjalankan fungsi berbeda pada masing-masing kawasan wisata. Di Taman Ghanjaran, pelaku usaha tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menjadi wadah koordinasi dan kerja sama antar pelaku UMKM. Sementara itu, di Sumber Gempong terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berperan dalam mendukung pengelolaan kegiatan wisata sekaligus menghubungkan aktivitas pariwisata dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan KUB dan Pokdarwis menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi telah didukung oleh kelembagaan kelompok yang memiliki fungsi dan pembagian peran dalam mendukung aktivitas usaha dan wisata. Sedangkan menurut Ibu Ratna Dewi, pengurus kelompok UMKM kuliner di Desa Ketapanrame:

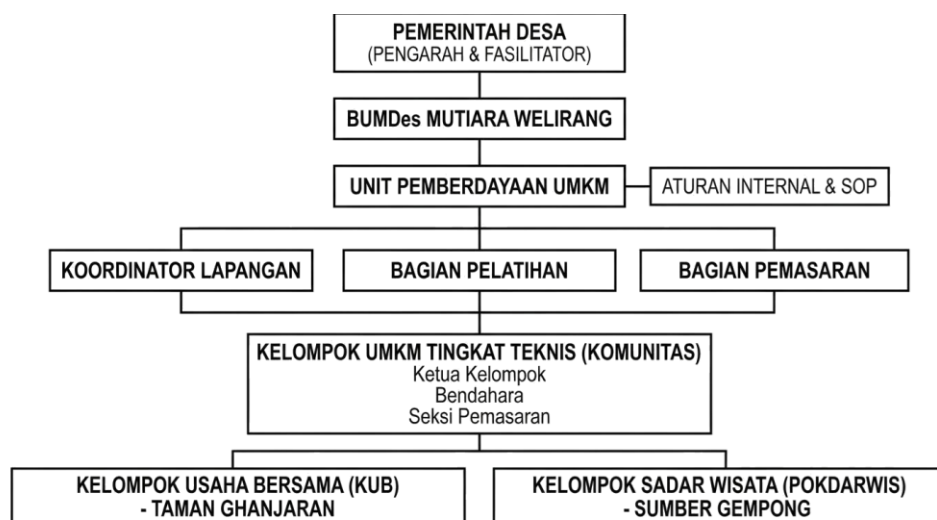
“Adanya kelompok UMKM yang difasilitasi BUMDes membuat kami lebih mudah mengakses informasi dan bantuan. Kami punya ketua kelompok, bendahara, dan seksi pemasaran yang bekerja secara terstruktur. Sebelum ada kelembagaan seperti ini, masing-masing UMKM berjalan sendiri-sendiri. Sekarang, kami bisa membuat agenda bersama, seperti mengikuti bazar atau memproduksi paket oleh-oleh desa.” (Wawancara 4 Februari 2025).

Pembentukan kelompok UMKM yang difasilitasi oleh BUMDes memberikan dampak signifikan dalam memperkuat koordinasi antar pelaku usaha. Dengan adanya struktur kepengurusan yang jelas, seperti ketua kelompok, bendahara, dan seksi pemasaran, kegiatan UMKM kini berjalan lebih terarah dan terorganisir. Sebelum adanya kelembagaan ini, masing-masing UMKM bergerak secara mandiri tanpa sinergi, sehingga akses terhadap informasi, bantuan, maupun peluang pasar menjadi lebih terbatas. Kini, melalui wadah kelompok, para pelaku UMKM dapat menyusun agenda bersama, misalnya berpartisipasi dalam bazar atau mengembangkan produk kolaborasi seperti paket oleh-oleh khas desa. Kelembagaan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akses terhadap peluang, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM karena mereka bergerak dalam sebuah sistem yang saling mendukung.

Secara kelembagaan, keberadaan KUB di Taman Ghanjaran dan Pokdarwis di Sumber Gempong menunjukkan adanya pembagian fungsi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. KUB lebih diarahkan sebagai wadah kerja sama pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sedangkan Pokdarwis memiliki fungsi yang lebih luas dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan kegiatan wisata yang menjadi lingkungan usaha masyarakat. Dengan adanya kelembagaan tersebut, koordinasi antar pelaku tidak lagi hanya dilakukan secara individual, tetapi dapat dilakukan melalui kelompok sehingga penyampaian informasi, penyusunan kegiatan, dan penyelesaian permasalahan usaha menjadi lebih terorganisir. Peran pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan Wakil Kepala Desa Ketapanrame yang menyampaikan bahwa:

“Pemerintah desa terus mendorong agar BUMDes dan kelompok UMKM memiliki pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik. Kami melakukan komunikasi secara berkala dengan pengurus BUMDes untuk melihat perkembangan program pemberdayaan dan memastikan kegiatan yang dijalankan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelompok UMKM juga kami dorong untuk aktif berkoordinasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.” (Wawancara 4 Februari 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai pengarah dan fasilitator dalam memperkuat kelembagaan pemberdayaan UMKM. Koordinasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok UMKM menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Selain memperjelas pembagian tugas, komunikasi yang dilakukan secara berkala juga membantu pemerintah desa mengetahui perkembangan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan tidak hanya dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi, tetapi juga melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan antaraktor yang terlibat. Struktur kelembagaan tersebut dapat digambarkan melalui hubungan dan pembagian peran antara pemerintah desa, BUMDes, kelompok UMKM, dan kelompok pendukung kegiatan wisata sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong
Sumber: BUMDes Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong (2025)

Gambar 3 menunjukkan bahwa struktur organisasi pemberdayaan UMKM di Desa Ketapanrame tersusun secara sistematis dari tingkat pembina hingga pelaksana di lapangan. Pada posisi paling atas, Pemerintah Desa berperan sebagai pengarah dan fasilitator utama dalam mengawasi serta mendukung pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Di bawah Pemerintah Desa, BUMDes Mutiara Welirang bertindak sebagai lembaga pengelola utama yang mengoordinasikan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes membentuk Unit Pemberdayaan UMKM yang memiliki fungsi khusus dalam mengelola kegiatan dan mendukung perkembangan usaha masyarakat. Unit tersebut menjalankan tugas secara terarah dengan berpedoman pada aturan internal dan SOP yang telah ditetapkan. Struktur unit pemberdayaan juga didukung oleh pembagian fungsi, yaitu koordinator lapangan, bagian pelatihan, dan bagian pemasaran yang memiliki tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dan kondisi kelembagaan di lapangan, terdapat beberapa bentuk kelembagaan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, yaitu unit pemberdayaan UMKM di bawah BUMDes, KUB di kawasan Taman Ghanjaran, dan Pokdarwis di kawasan Sumber Gempong. Keberadaan kelembagaan tersebut menunjukkan adanya wadah organisasi dengan fungsi yang berbeda, di mana KUB berperan dalam kerja sama kegiatan ekonomi, sedangkan Pokdarwis mendukung koordinasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan wisata yang membuka peluang usaha bagi UMKM. Selain itu, struktur kepengurusan dan pembagian fungsi menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan diwujudkan melalui koordinasi antara BUMDes, pemerintah desa, kelompok UMKM, dan masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong tidak hanya memperjelas arah kerja, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan serta koordinasi yang lebih solid antar pelaku UMKM. Hal ini terlihat dari terbentuknya unit pemberdayaan UMKM di bawah BUMDes, KUB di Taman Ghanjaran, serta Pokdarwis di Sumber Gempong yang masing-masing memiliki fungsi dalam mendukung kegiatan usaha dan pengelolaan wisata. Kondisi tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat dari Mardi Yatmo Hutomo pada indikator penguatan kelembagaan yang menekankan pentingnya struktur

organisasi, pembagian fungsi, koordinasi, dan mekanisme kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan pemberdayaan. Meskipun demikian, penguatan kelembagaan perlu didukung oleh sinergi dengan aspek pemberdayaan lainnya, seperti pendampingan dan penguatan kemitraan usaha, agar pelaksanaan pemberdayaan UMKM dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawan et al. (2023) yang menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan BUMDes menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan desa melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan organisasi. Persamaannya terletak pada pentingnya kelembagaan yang terstruktur dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada kelembagaan BUMDes untuk pembangunan desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada penguatan kelembagaan UMKM melalui BUMDes, KUB, dan Pokdarwis di desa wisata [24].

E. Penguatan Kemitraan Usaha

Indikator penguatan kemitraan usaha dalam teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo menekankan pentingnya membangun hubungan kerja sama antara masyarakat dengan berbagai pihak yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mendukung pengembangan usaha. Kemitraan dapat dilakukan dengan pemerintah, lembaga keuangan, pihak swasta, lembaga pendidikan, maupun pelaku usaha lainnya. Melalui kemitraan, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap permodalan, pengetahuan, teknologi, sarana pendukung, promosi, dan jaringan pemasaran yang sulit diperoleh apabila pelaku usaha berjalan secara mandiri. Kemitraan juga dapat memperkuat posisi UMKM karena hubungan kerja sama memungkinkan adanya pembagian peran antara masyarakat dan mitra sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.

Dalam konteks Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong, penguatan kemitraan dilakukan melalui peran BUMDes Mutiara Welirang dengan melibatkan berbagai pihak. Kemitraan tersebut mencakup pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, lembaga keuangan seperti BRI dan lembaga perbankan lainnya, pihak swasta seperti Astra, lembaga pendidikan seperti Universitas Surabaya (UBAYA), serta pelaku usaha di sekitar kawasan Trawas seperti hotel dan kafe. Selain BUMDes, terdapat pula kelompok masyarakat yang menjadi penghubung dalam kegiatan kemitraan, yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Taman Ghanjaran dan Pokdarwis Rakasiwi di Sumber Gempong. Masing-masing pihak memiliki bentuk dukungan yang berbeda, mulai dari pendataan dan pemetaan UMKM, pelatihan, pendampingan, akses permodalan, penyediaan sarana usaha, hingga perluasan jaringan pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Mutiara Welirang, dijelaskan bahwa:

“Kami menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung UMKM desa wisata. Misalnya, kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten untuk pelatihan manajemen usaha dan promosi digital, serta menggandeng bank daerah dalam memberikan akses permodalan dengan bunga ringan. Selain itu, kami juga menjalin hubungan dengan pengelola destinasi wisata lain untuk membuat paket wisata terpadu yang mencakup kunjungan ke Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong.” (Wawancara 3 Februari 2025).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun oleh BUMDes mencakup berbagai kebutuhan pengembangan UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, hingga perluasan jaringan wisata. Pokdarwis Rakasiwi di Sumber Gempong berperan dalam menghubungkan pelaku UMKM dengan pihak pemerintah daerah, sedangkan KUB di Taman Ghanjaran menjadi wadah koordinasi pelaku usaha dalam mengembangkan hubungan dengan pihak eksternal. Kemitraan dengan lembaga keuangan memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sumber pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usaha. Sementara itu, hubungan dengan pengelola destinasi wisata lain diarahkan pada pengembangan paket wisata terpadu sehingga dapat membuka peluang bagi produk UMKM untuk lebih dikenal oleh wisatawan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna Dewi, pengurus kelompok UMKM kuliner Desa Ketapanrame:

“Lewat BUMDes, kami bisa ikut pameran dan bazar yang diadakan pemerintah kabupaten maupun swasta. Bahkan, beberapa hotel dan kafe di sekitar Trawas mulai mengambil produk kami sebagai oleh-oleh resmi. Hubungan kerja sama ini sangat membantu memperluas penjualan dan membuat produk kami lebih dikenal.” (Wawancara 4 Februari 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kemitraan mampu membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi UMKM lokal. Melalui fasilitasi BUMDes dan kelompok UMKM, pelaku usaha memperoleh kesempatan mengikuti pameran dan bazar yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta. Selain itu, kerja sama dengan hotel dan kafe di sekitar Trawas memberikan saluran pemasaran tambahan bagi produk UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemitraan tidak hanya memberikan dukungan secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat berupa perluasan pasar dan peningkatan pengenalan produk lokal kepada konsumen. Peran masyarakat dalam mendukung penguatan kemitraan usaha juga disampaikan oleh RT setempat:

“Kerja sama antara warga, UMKM, dan pengelola wisata sekarang semakin baik. Kalau ada kegiatan atau tamu dari luar, biasanya kami ikut membantu menginformasikan kepada warga dan pelaku usaha. Kami juga mendukung ketika ada kerja sama dengan pihak luar, karena semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar juga kesempatan produk warga untuk dikenal dan dijual kepada pengunjung.” (Wawancara 4 Februari 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kemitraan usaha juga membutuhkan dukungan masyarakat di tingkat lingkungan. RT berperan dalam membantu menyampaikan informasi mengenai kegiatan maupun kerja sama yang melibatkan pihak eksternal kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Dukungan tersebut memperlancar koordinasi antara warga, pelaku UMKM, dan pengelola wisata. Keterlibatan masyarakat juga menunjukkan bahwa kemitraan dalam pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, tetapi turut membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal. Adapun program dan kegiatan penguatan kemitraan usaha yang melibatkan BUMDes, pemerintah, lembaga keuangan, pihak swasta, lembaga pendidikan, serta pelaku usaha di sekitar kawasan wisata selama tahun 2022–2024 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 4. Program/Kegiatan Penguatan Kemitraan Usaha Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Program/Kegiatan	Mitra yang Terlibat	Bentuk Dukungan/Kegiatan	Data Hasil
1	2022	Identifikasi dan Pendataan UMKM	BUMDes, KUB, dan Pokdarwis Rakasiwi	Pendataan kondisi usaha, jenis usaha, potensi, serta kebutuhan pelaku UMKM	75 UMKM terdata
2	2022	Pemetaan Potensi dan Tantangan UMKM	BUMDes, KUB, dan Pokdarwis Rakasiwi	Pemetaan potensi usaha, kendala permodalan, pemasaran, sarana-prasarana, dan kebutuhan pengembangan usaha	75 UMKM dipetakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan usaha
3	2023	Program Bantuan Modal Mikro	BUMDes, lembaga keuangan, dan pihak swasta/CSR	Fasilitasi akses permodalan untuk bahan baku, peralatan produksi, dan pengembangan usaha	20 UMKM memperoleh fasilitasi; Rp2.000.000–Rp10.000.000 per UMKM
4	2023	Penataan Fisik Stand UMKM	BUMDes, Pemerintah Desa, dan pihak swasta/CSR	Penyediaan dan penataan tempat usaha agar lebih layak, tertata, dan nyaman	15 unit lapak permanen, dilengkapi listrik, air bersih, dan papan nama usaha
5	2023	Pelatihan Manajemen dan Keuangan	Dinas Pariwisata, BUMDes, dan lembaga pendamping	Pelatihan pencatatan keuangan, pengelolaan modal, dan manajemen usaha	3 kegiatan; 55 UMKM mengikuti pelatihan
6	2023	Penguatan Branding dan Pemasaran	Astra, UBAYA, BUMDes	Pelatihan branding, desain kemasan, pembuatan konten, dan pemasaran digital	4 kegiatan; 61 UMKM mengikuti kegiatan
7	2024	Digitalisasi Produk UMKM	BUMDes, UBAYA, dan pihak pendamping	Pengembangan promosi digital, media sosial, katalog produk, dan identitas usaha	109 UMKM menjadi sasaran digitalisasi
8	2024	Pengembangan Jaringan Pemasaran	BUMDes, KUB, Pokdarwis, hotel, dan kafe	Fasilitasi pameran, bazar, serta kerja sama pemasaran dan distribusi produk	12 kegiatan promosi; 73 UMKM terlibat
9	2024	Penguatan Kemitraan dengan Pelaku Usaha	BUMDes, KUB, hotel, dan kafe sekitar Trawas	Penyaluran produk UMKM sebagai oleh-oleh dan produk pendukung kegiatan wisata	8 hotel/kafe bekerja sama dengan 26 UMKM
10	2024	Pengembangan Paket Wisata Terpadu	BUMDes, Pokdarwis, dan pengelola destinasi wisata	Pengembangan paket kunjungan yang menghubungkan destinasi wisata dengan produk UMKM	4 paket wisata dikembangkan

11	2024	Monitoring dan Evaluasi Kemitraan	BUMDes, KUB, dan Pokdarwis	Pemantauan perkembangan usaha, kendala UMKM, serta evaluasi kerja sama	6 kegiatan monitoring; 109 UMKM menjadi sasaran
----	------	-----------------------------------	----------------------------	--	---

Sumber: Bumdes Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong, 2025

Tabel 4 menunjukkan bahwa penguatan kemitraan usaha dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan UMKM. Pada tahun 2022, kegiatan masih diarahkan pada identifikasi, pendataan, serta pemetaan kondisi dan kebutuhan usaha dengan sasaran 75 UMKM. Tahap tersebut menjadi dasar bagi BUMDes, KUB, dan Pokdarwis Rakasiwi dalam menentukan bentuk dukungan yang diperlukan oleh pelaku usaha. Pada tahun 2023, kemitraan mulai diarahkan pada pemberian dukungan yang lebih konkret melalui fasilitasi akses modal, penataan tempat usaha, pelatihan manajemen, serta penguatan branding dan pemasaran. Selanjutnya, pada tahun 2024, kegiatan kemitraan semakin berkembang dengan adanya digitalisasi produk, perluasan jaringan pemasaran, kerja sama dengan hotel dan kafe, pengembangan paket wisata terpadu, serta monitoring dan evaluasi.

Pada aspek permodalan, terdapat 20 UMKM yang memperoleh fasilitasi akses pembiayaan dengan kisaran Rp2.000.000 sampai Rp10.000.000 per UMKM. Fasilitasi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, pengadaan peralatan produksi, maupun pengembangan usaha. Besaran pembiayaan yang berbeda menunjukkan bahwa dukungan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan skala usaha masing-masing pelaku UMKM. Kemitraan pada aspek permodalan tersebut memperlihatkan bahwa BUMDes berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan lembaga keuangan sehingga keterbatasan modal yang dihadapi pelaku usaha dapat dikurangi. Pada aspek sarana usaha, kemitraan menghasilkan penataan 15 unit lapak permanen yang dilengkapi dengan listrik, air bersih, dan papan nama usaha. Penyediaan fasilitas tersebut memberikan tempat usaha yang lebih layak bagi pelaku UMKM sekaligus meningkatkan keteraturan kawasan wisata. Keberadaan lapak permanen juga mendukung kenyamanan pengunjung ketika membeli produk masyarakat. Dengan demikian, dukungan kemitraan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas, tetapi juga menghasilkan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan ekonomi UMKM.

Pada aspek peningkatan kapasitas, kemitraan dilakukan melalui pelatihan manajemen, keuangan, branding, dan pemasaran digital. Pelatihan tersebut melibatkan pihak pemerintah, pihak swasta, lembaga pendidikan, dan BUMDes. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha sekaligus menyesuaikan produk dengan perkembangan kebutuhan pasar. Sementara itu, digitalisasi produk yang menyasar 109 UMKM pada tahun 2024 menunjukkan adanya perluasan cakupan kemitraan dalam mengikuti perkembangan pemasaran berbasis teknologi. Dalam aspek pemasaran, terdapat 12 kegiatan promosi berupa pameran dan bazar dengan keterlibatan 73 UMKM. Selain itu, kerja sama dengan delapan hotel dan kafe di sekitar Trawas memberikan akses pemasaran kepada 26 UMKM. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kemitraan mampu memperluas saluran pemasaran produk UMKM, tidak hanya melalui kawasan Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong, tetapi juga melalui jaringan usaha di sekitar kawasan wisata. Pengembangan empat paket wisata terpadu juga menjadi bentuk kemitraan yang menghubungkan kegiatan wisata dengan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga wisatawan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengenal dan membeli produk UMKM lokal.

Keberadaan KUB di Taman Ghanjaran dan Pokdarwis Rakasiwi di Sumber Gempong menjadi bagian penting dalam penguatan jaringan kemitraan tersebut. Kedua kelompok tersebut berfungsi sebagai wadah koordinasi sekaligus penghubung antara pelaku UMKM dengan BUMDes, pemerintah, pihak swasta, lembaga keuangan, dan pengelola wisata. Melalui kelembagaan tersebut, pelaku UMKM tidak harus membangun hubungan kemitraan secara individual, tetapi dapat memperoleh akses melalui jaringan kelompok. Hal ini memperkuat posisi masyarakat dalam berhubungan dengan pihak eksternal dan mempermudah penyampaian kebutuhan usaha. Jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan masyarakat Mardi Yatmo Hutomo, temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kemitraan usaha telah dilakukan melalui perluasan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Kemitraan tidak hanya dilihat dari jumlah pihak yang terlibat, tetapi juga dari bentuk dukungan yang diberikan, seperti pembiayaan, pelatihan, sarana usaha, promosi, dan jaringan pemasaran. Peran BUMDes sebagai penghubung, didukung oleh KUB dan Pokdarwis Rakasiwi, menunjukkan adanya pembagian peran antara masyarakat dan mitra eksternal sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Dengan demikian, kemitraan yang dibangun telah memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dalam mengembangkan usahanya.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan kemitraan usaha di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong telah dilakukan secara bertahap melalui identifikasi kebutuhan UMKM, fasilitasi permodalan, penyediaan sarana usaha, peningkatan kapasitas, pengembangan pemasaran, dan perluasan jejaring kerja sama. Kondisi tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan Mardi Yatmo Hutomo yang menempatkan kemitraan sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang pengembangan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Leksono dan Alfiani (2026) yang menunjukkan pentingnya pengembangan ekosistem

bisnis kemitraan berkelanjutan melalui BUMDes untuk memperkuat jaringan kerja sama dan keberlanjutan usaha masyarakat. Persamaannya terletak pada pentingnya BUMDes dalam membangun dan menghubungkan jaringan kerja sama untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perbedaan, penelitian tersebut berfokus pada pengembangan ekosistem bisnis kemitraan berkelanjutan melalui BUMDes, sedangkan penelitian ini memfokuskan penguatan kemitraan usaha sebagai salah satu indikator pemberdayaan masyarakat melalui UMKM di desa wisata dengan melibatkan BUMDes, KUB, Pokdarwis, pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, pihak swasta, serta pelaku usaha di sekitar kawasan wisata [25].

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui UMKM di Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa pada indikator permodalan, pelaku UMKM memperoleh modal dari modal pribadi, BUMDes, koperasi, dan bank, dengan dukungan BUMDes berupa pembiayaan serta pelatihan pengelolaan usaha. Pada indikator pembangunan sarana dan prasarana, BUMDes menyediakan lapak permanen, listrik, air bersih, gudang, serta akses jalan yang mendukung kegiatan usaha dan kenyamanan pengunjung. Pada indikator pendampingan, pelaku UMKM memperoleh pelatihan manajemen usaha, keuangan, branding, dan digital marketing yang membantu meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemasaran usaha. Pada indikator penguatan kelembagaan, pemberdayaan didukung oleh unit UMKM di bawah BUMDes, KUB, dan POKDARWIS yang berperan dalam koordinasi dan kerja sama antar pelaku. Pada indikator penguatan kemitraan usaha, BUMDes membangun kerja sama dengan pemerintah, lembaga keuangan, pihak swasta, lembaga pendidikan, serta pelaku usaha pariwisata untuk mendukung permodalan, pelatihan, promosi, dan pemasaran UMKM. Secara keseluruhan, kelima indikator tersebut memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM, meskipun masih diperlukan penguatan pada pemerataan akses modal, keberlanjutan pendampingan, pemeliharaan sarana, koordinasi kelembagaan, serta perluasan kemitraan dan pemasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Ketapanrame, BUMDes Mutiara Welirang, serta pengelola Desa Wisata Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong yang telah memberikan izin, informasi, dan dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Wakil Kepala Desa Ketapanrame, Ketua BUMDes, pengurus kelompok UMKM, RT setempat, serta para pelaku UMKM yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data serta pengalaman yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] H. K. Yuni, N. N. Ardani, M. Y. Bili, and T. I. Kurnia, "Pemberdayaan UMKM Berbasis Potensi Alam dalam Menunjang Pengembangan Desa Wisata Taro Menuju Pariwisata Berkelanjutan," *Bhakti Persada*, vol. 9, no. 1, pp. 16–25, 2023, doi: 10.31940/bp.v9i1.16-25.
- [2] A. S. I. C. Candra and Hasan Ismail, "Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Tas Kulit Di Tanggulangin Berbasis Digital Marketing," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 20, no. 1, pp. 126–139, 2023, doi: 10.59050/jian.v20i1.198.
- [3] I. Sinaga, A. Susana, M. Purwati, V. Ari, P. Akadiati, and F. Ariany, "Pemberdayaan UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Puspakraf) Bandar Lampung dalam Pengisian SPT Tahunan," *Near Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 2, pp. 156–161, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/nr/article/view/487%0Ahttps://jurnal.kdi.or.id/index.php/nr/article/download/487/263>
- [4] T. Ramadhani, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Kelompok Pembuat Kricu BaBe di Desa Batu Belubang)," *Resiprokal Jurnal Ris. Sociol. Progresif Aktual*, vol. 2, no. 2, pp. 200–210, 2020, doi: 10.29303/resiprokal.v2i2.31.
- [5] K. Mutrofin, A. N. Muhammad, and M. Mahmud, "Peran UMKM dalam Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur Selama Pandemi Covid – 19," *Jurnal Manaj.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2021.
- [6] S. Al Farisi, M. Iqbal Fasa, and Suharto, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Din. Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 1, pp. 73–84, 2022, doi: 10.53429/jdes.v9ino.1.307.
- [7] A. T. Mumtaz and M. Karmilah, "Digitalisasi Wisata di Desa Wisata," *Jurnal Kajian Ruang*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2022, doi: 10.30659/jkr.v1i1.19790.

- [8] I. Ibrahim *et al.*, “Pelatihan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Wisata Budaya pada Desa Mantar,” *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, vol. 7, no. 3, pp. 2013–2017, 2023, doi: 10.31764/jpmb.v7i3.17404.
- [9] T. Tamianingsih and D. F. Eprilianto, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Community Based Tourism (Studi Kasus Desa Wisata Ketapanrame Kabupaten Mojokerto Jawa Timur),” *Publika*, pp. 1025–1040, 2022, doi: 10.26740/publika.v10n3.p1025-1040.
- [10] K. Manurung, “Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi,” *Filadelfia Jurnal Teol. dan Pendidik. Kristen*, vol. 3, no. 1, pp. 285–300, 2022, doi: 10.55772/filadelfia.v3i1.48.
- [11] I. C. P. Fella, E. Haryati, and Suroso, “Efektivitas Pemberdayaan Pelaku UMKM dalam Program Desa Berdaya pada Taman Kuliner Paciran Inung Cintiyah Putri Fella, Eny Haryati, Suroso SAP – Edisi Khusus Oktober Tahun 2023,” *Jurnal Studi Administrasi Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 289–294, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7206>
- [12] M. Firmansyah, M. Masrun, and I. D. K. Yudha S, “Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif,” *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 3, no. 2, pp. 156–159, 2021, doi: 10.29303/e-jep.v3i2.46.
- [13] A. Tamsuri, “Literatur Review Penggunaan Metode Kirkpatrick untuk Evaluasi Pelatihan di Indonesia,” *J. Inov. Penelit.*, vol. 2, no. 8, pp. 2723–2734, 2022, [Online]. Available: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1154/879>
- [14] M. Irmansyah, “Analisis Sektor Unggulan yang Ada di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur,” *Jurnal Din. Ekonomi Pembangunan*, vol. 2, no. 1, pp. 7–13, 2024, doi: 10.33005/jdep.v2i1.86.
- [15] K. Pembangunan Wisata Taman Ganjaran Trawas Bagi Masyarakat Sekitar Jurnal Pembangunan Berkelanjutan and K. Pembangunan Wisata Taman Ganjaran Trawas bagi Masyarakat Sekitar Mochammad Barkah Fapag Dwitanto, “Citation: Mochammad Barkah Fapag Dwitanto,” *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, vol. 4, no. 1, pp. 85–90, 2021.
- [16] A. Ramadhani *et al.*, “Strategi Bumdes dalam Pengembangan Wisata Sawah Sumber Gempong di Kabupaten Mojokerto,” vol. 4, pp. 82–93, 2024.
- [17] S. Fatine, “Pemberdayaan Masyarakat Kota di Bidang Ekonomi Melalui UMKM Ladu Arai Pinang di Lubuk Buaya Kota Padang,” *Lamahu Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, vol. 1, no. 2, pp. 78–83, 2022, doi: 10.34312/ljpmt.v1i2.15346.
- [18] A. Afriansyah *et al.*, *Pemberdayaan Masyarakat*, 1st ed. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- [19] R. A. Mustofah and H. Sukmana, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Pia di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan,” *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 15, no. 01, pp. 11–23, 2025.
- [20] D. T. Ridhani and H. Sukmana, “Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Rumpit Laut,” *Hudan Lin Naas*, vol. 4, no. 2, pp. 191–216, 2023.
- [21] T. I. Aini, M. I. Sari, and P. Winahyu, “Analisis Kesehatan BUMDes Berdasarkan Aspek Permodalan, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan (Studi Kasus BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember),” *J. Ekon. dan Bisnis GROWTH*, vol. 20, no. 1, pp. 11–21, 2022.
- [22] N. A. Muaffaq *et al.*, “Revitalisasi Kawasan Wisata LGS Desa Kucur Melalui Optimalisasi Sarana-Prasarana dan Digitalisasi Pelayanan BUMDes Guna Akselerasi Peningkatan Kunjungan Wisatawan,” *I-Com Indones. Community J.*, vol. 6, no. 1, pp. 331–342, 2026.
- [23] D. L. R. Tini and R. Yuliastina, “Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Administasi BUMDes di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng,” *Janayu*, vol. 2, no. 1, pp. 66–76, 2021.
- [24] I. Kurniawan, M. D. Asri, L. Fitriani, and R. Priatna, “Penguatan Kelembagaan BUMDes untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Rancakalong,” *SeTIA Mengabdi – J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 73–83, 2023.
- [25] A. Y. Leksono and S. Alfiani, “Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Pengembangan Ekosistem Bisnis Kemitraan Berkelanjutan,” *JPI*, vol. 1, no. 1, pp. 21–28, 2026.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.